

**PERBANDINGAN POTENSI EKONOMI DESA TRANSMIGRASI DAN
DESA NON TRANSMIGRASI**

(Studi pada Desa Jati Datar Mataram dan Desa Mataram Udik)

(Skripsi)

Oleh
FAUZAN BAYU DARMAWAN

1716021017



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERBANDINGAN POTENSI EKONOMI DESA TRANSMIGRASI DAN DESA NON TRANSMIGRASI (Studi pada Desa Jati Datar Mataram dan Desa Mataram Udik)

**Oleh
Fauzan Bayu Darmawan**

Desa sebagai entitas tunggal menjadi titik simpul terkecil dalam pembangunan yang memerlukan konektivitas agar bisa memberikan dampak terhadap pembangunan pada lingkup wilayah yang lebih luas. Oleh karena itu pembangunan desa di fokuskan pada pengembangan potensi ekonomi masyarakat dengan tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di desa, walaupun demikian terkadang masih ada kesenjangan antara desa transmigrasi dengan desa non transmigrasi. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perbandingan potensi ekonomi Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi dan Desa Mataram Udik sebagai desa non transmigrasi. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melibatkan Kepala Desa Jati Datar Mataram, Kepala Desa Mataram Udik, masyarakat Desa Jati Datar Mataram dan masyarakat Desa Mataram Udik. Data yang diperoleh dari informan di analisis melalui reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi ekonomi Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi lebih baik di bandingkan dengan Desa Mataram Udik hal itu terlihat dari pendapatan per kapita yang lebih tinggi, struktur ekonomi banyak potensi yang di manfaatkan, urbanisasi tidak terlalu tinggi karena masing-masing desa sudah menyiapkan lapangan pekerjaan, Harapan Lama Sekolah (HLS) sedikit lebih baik di bandingkan dengan Desa Mataram Udik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Desa Jati Datar Mataram sedikit lebih tinggi di bandingkan dengan Desa Mataram Udik. Saran dalam penelitian ini adalah Kepada Desa hendaknya lebih maksimal dan bekerja keras lagi untuk mendorong masyarakat dalam pengembangan potensi desa, mengoptimalkan komunikasi dan kerja sama dengan desa-desa lain untuk mengembangkan potensi desa.

Kata kunci: Potensi Ekonomi, Transmigrasi, Non Transmigrasi

ABSTRACT

COMPARISON OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF TRANSMIGRATION AND NON-TRANSMIGRATION VILLAGES (Study in Jati Datar Mataram Village and Mataram Udik Village)

**By
Fauzan Bayu Darmawan**

The village as a single entity is the smallest node in development that requires connectivity in order to have an impact on development in a wider area. Therefore, village development is focused on developing the economic potential of the community with the aim of reducing the poverty rate in the village, however sometimes there is still a gap between transmigration villages and non-transmigration villages. Based on this, the formulation of the problem in this research is how to compare the economic potential of Jati Datar Mataram Village as a transmigration village and Mataram Udik Village as a non-transmigration village. This type of research is descriptive with a qualitative approach involving the Head of Jati Datar Mataram Village, the Head of Mataram Udik Village, the people of Jati Datar Mataram Village and the people of Mataram Udik Village. Data obtained from informants is analyzed through data reduction, data presentation and drawing conclusions or data verification. The results of the research show that the economic potential of Jati Datar Mataram Village as a transmigration village is better compared to Mataram Udik Village. This can be seen from the higher per capita income, the economic structure has a lot of potential that is utilized, urbanization is not too high because each village has preparing employment opportunities, Expected Years of Schooling (HLS) is slightly better compared to Mataram Udik Village, the Human Development Index (HDI) of Jati Datar Mataram Village is slightly higher compared to Mataram Udik Village. The suggestion in this research is that the village should be more optimal and work harder to encourage the community to develop village potential, optimize communication and cooperation with other villages to develop village potential.

Keywords: *Economic Potential, Transmigration, Non-Transmigration*

**PERBANDINGAN POTENSI EKONOMI DESA TRANSMIGRASI DAN
DESA NON TRANSMIGRASI**

(Studi pada Desa Jati Datar Mataram dan Desa Mataram Udik)

Oleh

Fauzan Bayu Darmawan

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN POTENSI EKONOMI
DESA TRANSMIGRASI DAN DESA NON
TRANSMIGRASI (Studi pada Desa Jati Datar
Mataram dan Desa Mataram Udik)**

Nama Mahasiswa : **Fauzan Bayu Darmawan**

No Pokok Mahasiswa : **1716021017**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

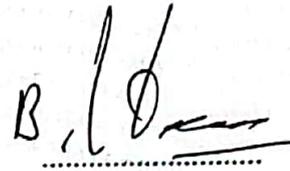
R. Sigit Krisbiantoro

Drs. R. Sigit Krisbiantoro, M.IP
NIP. 196112181989021001

PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP**



.....

Penguji Utama : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si**



.....



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Juni 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik (Sarjana) baik di Indonesia maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Fauzan Bayu Darmawan
1716021017

RIWAYAT HIDUP



Fauzan Bayu Darmawan dilahirkan pada tanggal 13 Agustus 1999 di Lampung Tengah. Anak kedua dari dua bersaudara, anak dari Bapak Haryanto dan Ibu Isdarwati Penulis mempunyai kakak Perempuan bernama Siska Happy Apriani.

Tingkat pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 02 Banjar Agung , Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 01 Bandar Mataram diselesaikan pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 01 Trimurjo diselesaikan pada tahun 2017.

Tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Pada tahun 2020 melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Ulu Semong Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Pada Bulan Januari 2020 juga telah melakukan Praktik Kerja Lapangan di Dinas DPMDT (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.) selama 30 hari.

MOTTO

Terkadang, Manusia Dengan Masa Lalu Yang Klam
Akan Menciptakan Masa Depan Yang Paling Cerah
(Ummar Bin Khattab)

Lebih baik kehilangan Sesuatu demi Tuhan Dari pada kehilangan
Tuhan demi mendapatkan sesutu
(Mufti Menk)

Tidak takut tersaingi, tidak berisik, tidak mencari
Validasi, tidak peduli hal-hal yang tidak penting, Diam,
Tenang, Menang.
(Fauzan Bayu Darmawan)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Ku Persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa: Kedua orang tuaku, Bapak Haryanto dan Ibu Isdarwati, yang senantiasa sabar dalam membimbing setiap langkahku, mendidikku dengan penuh cinta, mendoakan serta melimpahkan segenap kasih sayang dan materi yang tiada terhingga.

Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017.

Almamater Tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala puji syukur bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah melimpahkan karunia berupa kekuatan lahir dan batin sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Perbandingan Potensi Ekonomi Desa Transmigrasi dan Desa Non Transmigrasi” (Studi Khusus Desa Jatidatar Mataram dan Desa Mataram Udik) Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis bisa sampai menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari hidayah, karunia, dukungan, motivasi, bimbingan, bantuan, kritik, saran, dan yang utama adalah doa yang berasal dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Jagat Raya, Hamba berterima kasih atas berkat rahmat dan karunia-Mu, hamba dapat menyelesaikan skripsi ini, Sesungguhnya sekeras apapun usaha hamba tak akan berhenti tanpa ridha dan kuasa-Mu.
2. Kedua orang tua ku, Haryanto. dan Isdarwati. yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi selama-lamanya, yang selalu sabar mendampingi putramu ini dalam menyelesaikan skripsi ini, Terima Kasih sebesar-besarnya ayah dan ibu, bahkan dengan segala apapun yang akan putra bungsumu ini miliki kelak di masa depan nanti tidak akan pernah cukup untuk membalas walaupun sedikit keringat, jerih payah, dan doa Bapak dan Ibu selama ini untuk putra bungsumu ini, semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan dalam segala langkah Ayah dan Mama untuk keluarga dan pekerjaan selalu di ridhoi oleh Allah SWT dan selalu dalam perlindungan-Nya.

3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sekaligus Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus sebagai dosen Penguji Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran demi kesempurnaan isi skripsi ini.
8. Bapak Budi Harjo S.Sos.,M.IP. selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas masukan dan kritiknya selama menjadi dosen pembimbing yang hingga saat ini masih dan akan selalu teringat pesan serta motivasi yang telah bapak berikan kepada penulis.
9. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu semua. Saya sangat bersyukur dapat oleh bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih telah menjadi seseorang yang berpengaruh bagi peneliti untuk memperoleh ilmu pengetahuan.
10. Kakakku tersayang, Siska Happy Apriani, terima kasih atas kepercayaan abang selama ini. Adek minta maaf apabila selama ini masih berperilaku dan bertutur kata yang masih sedikit tidak mengenakan. Semoga kelak nanti abang menjadi orang yang sukses.
11. Keluarga besarku yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam memaknai kehidupan.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan terbaikku di kampus, M. Giovanni Satria L, Ramadhani Gista Erlangga, Imam Dwi Santoso, L.A. Rachmat Rajani Akbar, Al Rizky Salbari, Achmad Raehan Hatim, Muhammad Khadafi, Akbar Rahmatullah, Noven Sanjaya, Evando Yulisa. Terima kasih atas kehadiran dan *support* kalian selama ini di

kehidupan dan penyelesaian skripsi ini, semoga ke depannya kita tetap akan menjadi sahabat selamanya dan akan sukses semua di masa depan nanti.

13. Teman-teman kelas Reguler A 2017 yang tidak bisa disebutkan semuanya. Terima kasih atas keseruannya selama kita di kampus banyak momen yang tidak bisa terlupakan dan berkesan untuk menjadi cerita dikelak hari tua nanti.
14. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2017 yang telah memberikan pengalaman, ilmu, keseruan, dan banyak lagi, terima kasih sudah menjadi bagian dari kalian.
15. Teman-teman Bengkel RJM Pringsewu, Pak mekanik H. Toy, Dio Revalda, Fatur, Diki, Zaki Wiratara, Bagus Dwi, Dhimas Resky, Noka, Nofal, Bhelly, Engga Maulana, Doni Irawan, Ghanesa. Terima kasih atas dukungan dan motivasi kalian dalam hal untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman main di rumah, Fahri Evand, Erwantole, Riko Pratama, Dimas Saputra Roni Hasiholan dan teman satu kosan Ardi Nurwahyudi Rachman Habibansyah. Terima kasih telah mensupport dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman KKN Pekon Ulu Semong Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Yang tidak saya sebutkan satu persatu Semoga sukses selalu menyertai kita dan semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dalam setiap langkah kita.
18. Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terutama para informan yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, Desember 2023
Penulis,

Fauzan Bayu Darmawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan tentang Perbandingan Pembangunan Desa	10
1. Pengertian Perbandingan	10
2. Pengertian Pembangunan.....	11
3. Pembangunan Desa.....	14
4. Aspek - Aspek Perbandingan Pembangunan Desa.....	24
2.2 Tinjauan tentang Potensi Desa	27
1. Pengertian Potensi Desa	27
2. Pengembangan Potensi Desa	29
3. Tujuan Pengembangan Potensi Desa.....	30
2.3 Tinjauan tentang Desa Transmigrasi dan Desa Non Transmigrasi	31
1. Desa Transmigrasi	31
2. Desa Non Transmigrasi	32
2.4 Kerangka Pikir	33
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian.....	36
3.2 Fokus Penelitian	37
3.3 Lokasi Penelitian	37
3.4 Jenis Data	38
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.6 Teknik Pengelolaan Data	41
3.7 Teknik Analisis Data.....	41
3.8 Keabsahan Data.....	42
IV. GAMBARAN UMUM	
4.1 Gambaran Umum Desa Mataram Udik Sebagai Desa Non Transmigrasi.....	44

4.1.1 Sejarah Desa Mataram Udik	44
4.1.2 Keadaan Geografis Desa Mataram Udik.....	45
4.1.3 Kondisi Penduduk Desa Mataram Udik.....	45
4.1.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Mataram Udik.....	46
4.1.5 Kondisi Pendidikan Penduduk di Desa Mataram Udik.....	46
4.2 Gambaran Umum Desa Jati Datar Mataram Sebagai Desa Transmigrasi.....	47
4.2.1 Sejarah Desa Jati Datar Mataram	47
4.2.2 Keadaan Geografis Desa Jati Datar Mataram	48
4.2.3 Kondisi Penduduk Desa Jati Datar Mataram	49
4.2.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Jati Datar Mataram	49
4.2.5 Kondisi Pendidikan Penduduk di Desa Jati Datar Mataram	50

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian.....	52
5.1.1 Perbandingan Potensi Ekonomi Desa Mataram Udik Sebagai Desa Non Transmigrasi dan Desa Jati Datar Mataram Sebagai Desa Transmigrasi.....	52
5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Mataram Udik Sebagai Desa Non Transmigrasi dan Desa Jati Datar Mataram Sebagai Desa Transmigrasi	72
5.2 Pembahasan	79

VI. PENUTUP

6.1 Simpulan.....	89
6.2 Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2	Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 3.1	Informan Penelitian	40
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk di Desa Jati Datar Mataram Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	49
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk di Desa Jati Datar Mataram Berdasarkan Mata Pencaharian, Tahun 2022	50
Tabel 4.3.	Distribusi Penduduk Desa Jati Datar Mataram Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	35
Gambar 4.1	Kondisi Penduduk Desa Mataram Udik.....	45
Gambar 4.2	Mata Pencaharian Penduduk Desa Mataram Udik.....	46
Gambar 4.3	Kondisi Pendidikan Penduduk di Desa Mataram Udik.....	47
Gambar 5.1	Harapan Lama Sekolah (HLS) Desa Jati Datar Mataram dengan Desa Mataram Udik	66
Gambar 5.2	Rata-Rata Harapan Lama Sekolah (HLS) Desa Jati Datar Mataram dengan Desa Mataram Udik	67
Gambar 5.3	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Desa Jati Datar Mataram dengan Desa Mataram Udik	67
Gambar 5.4	Pengeluaran per Kapita Desa Jati Datar Mataram dengan Desa Mataram Udik	69
Gambar 5.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Desa Jati Datar Mataram dengan Desa Mataram Udik	70

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi masih menimbulkan kesenjangan di beberapa wilayah, tak terkecuali kesenjangan wilayah desa dan kota. Wilayah kota memiliki perkembangan pembangunan yang cepat sedangkan wilayah desa berkembang lebih lambat. Hal tersebut dapat mendorong munculnya permasalahan sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pembangunan wilayah yang dapat menghasilkan pemerataan pembangunan nasional. Berdasarkan amanat Nawacita ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”, maka pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Nawacita tersebut pada hakikatnya sejalan dengan pembangunan skala lokal, yaitu dimulai dari lingkup paling kecil di sebuah negara yang disebut desa, sehingga ke depannya desa dapat berdaya saing dalam pembangunan wilayah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menguraikan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan aset penting dalam sebuah negara yang menjadi modal penggerak kemajuan masyarakat dalam suatu pembangunan. Desa sebagai entitas tunggal menjadi titik simpul terkecil dalam pembangunan yang memerlukan

konektivitas agar bisa memberikan dampak terhadap pembangunan pada lingkup wilayah yang lebih luas.

Desa merupakan suatu institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri, yang harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan yang disebut otonomi desa. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh, serta bukan pemberian dari pemerintah. Adanya otonomi desa menjadikan desa memiliki hak-hak istimewa diantaranya terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa, dan proses pembangunan, pemanfaatan potensi ekonomi desa.

Selain itu desa memiliki banyak potensi, tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk pembangunan desa.

Pembangunan desa di fokuskan pada empat aspek yaitu *pertama*, pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dalam perubahan struktur masyarakat pedesaan tradisional ke masyarakat yang maju dan mandiri. *Kedua*, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas serta daya saing. *Ketiga*, pembangunan prasarana agar sumber daya yang ada di pedesaan dapat dimanfaatkan secara optimal. *Keempat*, pembangunan kelembagaan pedesaan agar pembangunan pedesaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan keempat aspek tersebut aspek utama yang menjadi prioritas pembangunan desa adalah aspek pengembangan potensi ekonomi desa, tujuan dari pengembangan potensi ekonomi desa adalah menghapus kemiskinan yang ada di desa hal itu dikarenakan potret sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia berada di wilayah pedesaan, maka program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan potensi desa diharapkan dapat membantu mencapai target masyarakat yang sejahtera mengingat desa memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun saat ini pemanfaatan potensi ekonomi desa belum mampu di manfaatkan dengan baik dan dilaksanakan secara merata, bahkan tidak jarang kurangnya pemerataan pembangunan ekonomi berdampak pada adanya kesenjangan antar desa, biasanya hal ini terjadi pada desa transmigrasi dengan desa non transmigrasi.

Pertumbuhan ekonomi desa transmigrasi dianggap lebih baik hal itu tidak terlepas dari masyarakat-masyarakat transmigrasi atau pendatang memiliki sifat kerja keras yang tinggi dan mampu mengolah sumber daya alam yang terdapat di desa dengan baik dan maksimal. Hal ini terlihat dari kepemilikan lahan yang ada di desa. Sebagian masyarakat yang ada di desa transmigrasi memiliki lahan yang cukup luas dan banyak dibandingkan dengan masyarakat aslinya atau non transmigrasi. Tentu hal ini menjadi fenomena mengapa masyarakat yang ada di desa transmigrasi lebih bisa mengolah sumber daya alam yang tersedia di desa dibandingkan dengan masyarakat asli atau non transmigrasi.

Sementara itu jika dilihat dari masyarakat di desa non transmigrasi atau masyarakat asli terlihat kurang maksimal dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada desa non transmigrasi, hal ini tidak terlepas dari masyarakat asli atau non transmigrasi cenderung bertahan dengan keadaan mereka yang apa adanya. Sangat sedikit suku asli yang menempati desa non transmigrasi yang terlihat mengalami perkembangan pesat, baik itu dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikannya. Jika dilihat dari status masyarakat asli yang ada di desa non transmigrasi, seharusnya mereka lebih menguasai

dan memahami daerah sendiri. Penduduk asli seharusnya lebih mengerti cara memanfaatkan sumber daya yang ada di desa tetapi pada kenyataannya, sumber daya alam yang terdapat di desa tidak banyak dimanfaatkan oleh masyarakat asli yang ada di desa non transmigrasi.

Fenomena ini juga terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang berada di Desa Jati Datar Mataram dan Desa Mataram Udik. Desa Mataram Udik merupakan kawasan yang banyak dihuni oleh masyarakat asli bukan pendatang atau dengan kata lain masyarakat non transmigrasi yang berada di Kecamatan Bandar Mataram memiliki total penduduk sebanyak 34.308 jiwa dengan rata-rata bekerja sebagai petani dan wiraswasta. Potensi sumber daya alam untuk menunjang ekonomi masyarakat desa tidak terlalu banyak di mana masyarakat Desa Mataram Udik hanya mengandalkan aktivitas pertanian dan industri ekonomi kreatif, untuk mendukung aktivitas masyarakat Desa Mataram Udik pemerintah Desa Mataram Udik membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Namun usaha memaksimalkan BUMDes di Desa Mataram Udik masih kurang berjalan dengan maksimal banyak program ekonomi produktif yang tidak berjalan dan terhenti di tengah jalan seperti usaha pembuatan batako, toko kelontong, depot air, unit usaha *sound system*, unit usaha simpan pinjam, unit usaha sewa tenda, unit usaha panggung rias dan unit usaha pembuatan pupuk organik, dari beberapa unit usaha tersebut hanya tinggal unit pupuk organik yang berjalan saat ini tidak terlepas dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan unit usaha dan lebih memilih untuk bertani ataupun berkebun, (Hasil Observasi Pra Penelitian Tanggal 4 Desember 2022).

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan potensi ekonomi desa justru berbalik dengan keadaan ekonomi masyarakat Desa Jati Datar Mataram, Desa Jati Datar Mataram merupakan salah satu desa transmigrasi di mana desa ini dihuni oleh penduduk pendatang dari pulau Jawa, desa ini ada di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten

Lampung Tengah. Desa Jati Datar Mataram memiliki jumlah penduduk sebesar 5.540 jiwa, dengan rata-rata pencaharian masyarakat di Desa Jati Datar Mataram adalah petani, peternak, perkebunan dan pedagang. Potensi Desa Jati Datar Mataram sama yaitu pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Potensi-potensi Desa Jati Datar Mataram sangat di manfaatkan oleh masyarakat Desa Jati Datar Mataram hal itu terlihat dari potensi pertanian yang mampu menghasilkan 5,78 ton/ha padi pada tahun 2021, potensi peternakan rata-rata masyarakat di Desa Jati Datar Mataram memiliki usaha ternak sapi perah, sapi biasa, dan kerbau serta ternak non-ruminansia seperti ayam ras, itik, dan ayam kampung. Selain itu ada 1.476 orang yang mampu mengembangkan potensi perikanan dengan membangun tambak ikan dan udang.

Selain potensi sumber daya alam yang mampu di manfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat Desa Jati Datar Mataram, masyarakat Desa Jati Datar Mataram juga aktif dalam meningkatkan usaha ekonomi kreatif berbentuk kerajinan dan olahan bahan makanan. Industri pengolahan makanan di Desa Jati Datar Mataram sebagian besar adalah berbahan dasar pisang dan singkong. Industri pengolahan bahan makanan sejalan dengan potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh Desa Jati Datar Mataram, karena produksi bahan dasar singkong dan pisang berada di atas rata-rata produktivitas Kecamatan Bandar Mataram. Temuan lain dalam industri rumah tangga di Desa Jati Datar Mataram adalah Desa Jati Datar Mataram ini merupakan sentra penghasil tahu di Kecamatan Bandar Mataram di mana jumlah pengrajin tahu yang memproduksi ada sebanyak 248 pengrajin, (Hasi Observasi Pra Penelitian Tanggal 4 Desember 2022).

Berdasarkan fakta kedua desa di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan kesamaan di antara desa transmigrasi dan non transmigrasi, di mana kesamaannya yang diperoleh dari hasil pra penelitian adalah terdapat pada potensi sumber daya alam yang sama yaitu sama-sama memanfaatkan lahan persawahan untuk penanam padi dan ladang untuk penanaman palawija, yang membedakan adalah namun tingkat kesejahteraan masyarakat di mana

masyarakat yang berada di wilayah desa transmigrasi mampu memanfaatkan potensi persawahan dan ladang dengan maksimal dengan adanya peningkatan hasil panen selain itu juga banyak usaha ekonomi kreatif yang mampu dikembangkan oleh masyarakat walaupun tidak ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), berbeda dengan desa non transmigrasi di mana hasil panen padi dan palawija tidak mampu dikembangkan yang dilihat dari hasil panen yang cenderung fluktuasi serta banyak usaha ekonomi produktif yang terhenti walaupun sudah di Kelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Untuk menguatkan penelitian ini maka peneliti akan menambahkan penelitian-penelitian terdahulu, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
1	Roy Rickardo (2017)	Perbandingan Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa'Mering dan Desa Ma'Libu Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan)	Strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa Pa'Mering dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih kurang. Karena Kepala Desa sebagai pemimpin di dalam desa tidak tegas serta tidak mampu memberikan teguran kepada masyarakat yang kurang aktif berpartisipasi mengikuti pelaksanaan pembangunan di dalam desa. Sedangkan Strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa Ma'Libu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa sudah baik. Karena Kepala Desa memiliki sifat ketegasan dalam memimpin masyarakat dalam pembangunan desa. Serta mampu memberikan teguran langsung dan memanggil atau mendatangi masyarakat desa yang kurang aktif berpartisipasi mengikuti

			pelaksanaan pembangunan di dalam desa
2	Norman (2017)	Perbandingan Pembangunan Desa Karya Jaya Dan Pembangunan Desa Tani Bakti Di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara	Perbandingan Pembangunan Desa Karya Jaya dan Pembangunan Desa Tani Bakti di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa terdapat persamaan-persamaan pembangunan baik dibidang fisik dan non fisik, persamaan itu berupa pembangunan jalan, sarana prasarana perairan, pelatihan dibidang kesehatan dan pertanian sedangkan perbedaan-perbedaan pembangunan fisik dan non fisiknya berupa penyediaan sarana perairan yang berbeda fungsi, Desa Karya Jaya melakukan pembangunan sarana perairan untuk lahan pertanian sedangkan Desa Tani Bakti memanfaatkannya sebagai kebutuhan sehari-hari dan pembangunan non fisik yang menjadi pembeda dari kedua desa ini ialah dalam usaha peningkatan Sumber Daya Manusia, Desa Karya Jaya sedang melakukan pelatihan dibidang teknologi untuk masyarakatnya sedangkan Desa Tani Bakti belum melakukan kegiatan itu
3	Balinda Citra Pratiwi (2020)	Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbangdes (Studi perbandingan di Desa Candimulyo Kecamatan Jombang, Desa Mojojejer	Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dicapai oleh suatu wilayah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di tiga situs penelitian tersebut. Hasil

		Kecamatan Mojowarno, dan Desa Bendungan Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang)	penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes di kedua desa yaitu Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno dan Desa Bendungan Kecamatan Kudu sudah cukup tinggi, sedangkan Desa Candimulyo Kecamatan Jombang partisipasinya masih rendah.
--	--	---	--

Mencermati hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut dan fenomena di desa transmigrasi dan non transmigrasi maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu penelitian yang berjudul: **“Perbandingan Potensi Ekonomi Desa Transmigrasi dan Desa Non Transmigrasi (Studi pada Desa Jati Datar Mataram dan Desa Mataram Udik)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan potensi ekonomi Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi dan Desa Mataram Udik sebagai desa non transmigrasi?
2. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengembangan potensi ekonomi Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi dan Desa Mataram Udik sebagai desa non transmigrasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan potensi ekonomi Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi dan Desa Mataram Udik sebagai desa non transmigrasi
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan potensi ekonomi Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi dan Desa Mataram Udik sebagai desa non transmigrasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan antara lain:

1. Kegunaan akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan perbandingan potensi ekonomi Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi dan Desa Mataram Udik sebagai desa non transmigrasi.

2. Kegunaan praktis

Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi dan Desa Mataram Udik sebagai desa non transmigrasi untuk memaksimalkan berbagai potensi ekonomi desa agar kesejahteraan masyarakat di desa terus meningkat dan mampu menurunkan angka kemiskinan di pedesaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Perbandingan Pembangunan Desa

1. Pengertian Perbandingan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perbandingan berasal dari kata banding yang berarti persamaan, selanjutnya membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya. Perbandingan diartikan sebagai selisih persamaan (Marhiyanto, 2020:57).

Menurut Basah (2014:7), perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas.

Menurut Hartono, (2021:26), pengertian perbandingan tidak ada definisi khusus baik dari segi undang-undang, literatur maupun pendapat para sarjana, namun perbandingan itu hanyalah merupakan suatu metode saja, sehingga dapat diambil dari ilmu sosial-sosial lainnya. Namun terdapat dua paham tentang perbandingan hukum, yaitu ada yang menganggap sebagai metode penelitian belaka dan ada juga yang menganggap sebagai suatu bidang ilmu hukum yang mandiri.

Dalam analisa perbandingan biasanya melalui tiga tahap yaitu *tahap pertama* merupakan kegiatan deskriptif untuk mencari informasi, *tahap kedua* memilah-milah informasi berdasarkan klasifikasi tertentu, dan *tahap ketiga* menganalisis hasil pengklasifikasian itu untuk dilihat keteraturan dan hubungan antara berbagai variabel. Studi perbandingan bisa memberikan kepada kita perspektif tentang lembaga-lembaga, kebaikan dan keburukan dan apa yang menyebabkan lembaga-lembaga itu terbentuk, (Mas' oed, 2018:26-29)

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa perbandingan adalah membandingkan dua hal/lembaga untuk diketahui perbedaan dan persamaan kedua lembaga melalui tahap-tahap tertentu.

2. Pengertian Pembangunan

Pembangunan yang ideal dan berkelanjutan jika didasarkan pada basis kekuatan dan kemampuan rakyat, tanpa basis kekuatan dan kemampuan rakyat, mustahil hasil pembangunan berefek jangka panjang. Menurut Isran (2013:26) kurangnya dukungan kekuatan dan kemampuan rakyat dalam proses pembangunan, maka pembangunan akan terjebak dalam kegagalan (*failed trap*). Dalam konteks ini perlu diformulasikan apa sesungguhnya makna pembangunan. Jika mencoba memformulasikan, pembangunan dapat diartikan suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasi yang manusiawi, bermartabat, dan mandiri.

Menurut Siagian (dalam Isran, 2013:70), memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (dalam Isran, 2013:84) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai

suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pembangunan (*development*) merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan bertujuan memberikan perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sementara itu bahwa pembangunan nasional diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat disektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.

Menurut Hartmann dan Kwauk, (2021:284-305), menjelaskan bahwa proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah keseluruhan aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya. Proses modernisasi merupakan suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai

dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional. Pengertian pembangunan dapat juga diartikan dalam falsafah pembangunan bangsa Indonesia, yaitu pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, manusia adalah yang merupakan titik sentral dari segala upaya pembangunan.

Manusia adalah subjek pembangunan, yaitu sebagai makhluk tuhan yang paling mulia di muka bumi ini, yang akan dibangun harkat dan martabatnya. Senada dengan falsafah Pancasila, Isran (2013:97) mengatakan bahwa manusia adalah sumber daya pembangunan yang paling utama diantara sumber - sumber daya lain yang akan dibangun kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pembangunan juga diasumsikan sebagai pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya. Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang ,baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan atau peningkatan dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama.

3. Pembangunan Desa

a. Pengertian Desa

Secara etimologi, desa berasal dari bahasa sansekerta, *Dhesi*, yang artinya tanah kelahiran. Sebagai tanah kelahiran, desa dipahami sebagai tempat atau wilayah yang menggambarkan kehidupan sosial penduduknya. Jadi desa tidak dilihat dari penampakan fisiknya, pola pemukiman desa bersifat dinamis, masyarakat senantiasa beradaptasi spasial dan ekologis, serta lekat dengan kegiatan agraris. Konon, istilah desa dari Bahasa Sangsekerta yang berarti tanah tumpah darah. Istilah desa awalnya sering digunakan untuk menyebut unit pemukiman kecil di Pulau Jawa (pada masa kolonial belanda). Saat itu desa mulanya dihuni orang satu keturunan. Mereka memiliki nenek moyang sama, yaitu para cikal bakal pendiri pemukiman tersebut. Pemenuhan kebutuhan, permasalahan ekonomi juga bermunculan. Beberapa keluarga keluar, mendirikan pemukiman baru dengan cara membuka hutan, (Mintarjo dan Sulistyowati, 2019:21).

Sedangkan desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam, (Alaslan, 2021:2). Setyowati (2021:12), menjelaskan bahwa desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam.

Tata Kelola desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pengelolaan desa dalam pembangunan dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat secara partisipasi mulai

tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sejak reformasi 1998 wewenang aparatur pemerintah desa tidak diperoleh sepenuhnya, karena program-program pemberdayaan masyarakat melarang pemerintah desa turut serta dalam proses pembangunan tersebut. Peran pembinaan dalam program pemberdayaan masyarakat ditangani oleh konsultan pendamping dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Wewenang pemerintah desa dalam pembangunan muncul kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah desa menjadi pengelola keuangan desa dan program pembangunan, di samping itu, pemerintah desa juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat. Dipahami sebagai bagian dari gerakan reformasi, berbagai kebijakan tentang desa menumbuhkan harapan tentang kebebasan komunitas lokal untuk mengembangkan diri atau otonom, (Irawan, 2017:2).

Menurut Ramlan dan Sihombing (2021:3), menjelaskan bahwa istilah desa di Indonesia, menurut konsep lama ditandai sebagai berikut

- 1) Desa dan masyarakat desa sangat erat hubungannya dengan lingkungan alam
- 2) Iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani, sehingga warga desa banyak tergantung pada irama musim
- 3) Keluarga desa merupakan suatu unit sosial dan unit kerja
- 4) Jumlah penduduk desa dan luas desa tidak begitu besar
- 5) Struktur ekonominya *domineered agraris*
- 6) Masyarakat desa merupakan suatu paguyuban atau *gemeinschaft*
- 7) Proses sosialnya berjalan lambat
- 8) Warga desa berpendidikan rendah dengan kehidupan yang terpencil dan sederhana.

Sedangkan istilah desa dalam arti baru sudah berbeda karena terbukanya hubungan langsung dengan kota dan desa terdekat, dan tidak langsung sebagai akibat terbentuknya hubungan Indonesia dengan luar negeri. Keadaan yang baru ini mengakibatkan terbukanya pikiran warga desa, sehingga masalah pendidikan, masalah ekonomi pedesaan dan masalah pengembangan desa mendapat tanggapan dan kenyataan yang baik. Perubahan ini membawa pandangan – pandangan baru mengenai pengertian/definisi desa yang berada dengan pengertian desa menurut konsep lama. Lebih-lebih apabila dibandingkan dengan keadaan desa-desa pada zaman penjajahan, (Bardi, 2020:8).

Berdasarkan penjelasan di atas maka desa memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah:

- 1) Dalam hubungan dengan kota fungsi desa merupakan daerah belakang (*hinterland*) yaitu berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makanan pokok, perdagangan dan tenaga manusia
- 2) Ditinjau dari sudut potensi ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung-lumbung “bahan mentah” dan lumbung “tenaga manusia yang tidak kecil artinya”
- 3) Dari segi mata pencaharian warga desa, dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur desa industri, desa nelayan dan sebagainya
- 4) Dari segi tahap-tahap repelita desa berfungsi sebagai:
 - a) Potensi pembangunan
 - b) Pamer pembangunan dari pemerintah Republik Indonesia.

Dengan fungsi desa sebagai potensi dan partner pembangunan, sudah jelas bahwa warga desa pada waktu ini dan yang akan datang merupakan eksponen pembangunan yang penting. Oleh karena itu pembangunan desa yang dilaksanakan haruslah mengutamakan semangat kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong dalam rangka mewujudkan perdamaian serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali, (Dzafina, 2019:21).

b. Pengertian Pembangunan Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.

Menurut Wahjudin (2015:266), pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Menurut Adisasmita (2016:3), banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu, dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa.

Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat di harapkan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan. Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah dana desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa.

Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa menyandang peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfer yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan dengan maksimal. Sehingga upaya pembangunan di desa ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah basik perubahan.

c. Tujuan Pembangunan Desa

Menurut Wahjudin (2015:262), sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipasi
- 2) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan

- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan
- 4) Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2 (dua) yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam, (Adisasmita, 2016:57).

Memaknai beberapa pendapat mengenai tujuan pembangunan desa menurut beberapa teori para ahli, bahwasanya hakikat tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang (sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan) secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat.

d. Perencanaan Pembangunan Desa

Melakukan misi menjadikan sebuah desa menjadi mandiri ini adalah hal yang sangat penting. Membangun suatu hal harus dimulai dengan yang namanya proses perencanaan. Kalau membicarakan masalah pembangunan desa maka kita harus mengetahui proses dari perencanaan pembangunan desa yang baik. menciptakan sebuah pembangunan desa yang efektif, bukan semata-mata karena adanya

kesempatan. Namun merupakan hasil dari penentuan beberapa pilihan yang akan di ambil dalam prioritas kegiatan. Proses perencanaan yang baik, maka akan menimbulkan sebuah program yang baik pula dan dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah akan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut bekerja sama dalam menjalankan program tersebut. Wujud nyata sebuah kewenangan dalam mengatur pembangunan desa adalah pada proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan.

Pemerintah desa dapat menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah di buat di tingkat kabupaten/kota. Pada perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak-pihak yang lebih kompeten dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknisnya ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk mengkoordinasikan program pembangunan desanya, Kepala Desa ini didampingi oleh seorang pendamping profesional. Sedangkan Camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya sendiri.

Menurut Kessa, (2015:19), menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara berjenjang meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan

RPJM Desa harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan di hitung sejak pelantikan Kepala Desa. Di dalam rancangan RPJM Desa ini terdapat visi misi kepala desa, ada juga arah kebijakan pembangunan desa, serta ada juga rancangan kegiatan tentang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam buku tentang perencanaan pembangunan dijelaskan bahwa bidang penyelenggaraan pemerintah desa ini antara lain:

- a) Penetapan dan penegasan batas desa
 - b) Pendapatan desa
 - c) Penyusunan tata ruang desa
 - d) Penyelenggaraan musyawarah desa
 - e) Pengelolaan informasi desa
 - f) Penyelenggaraan perencanaan desa
 - g) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
 - h) Penyelenggaraan kerja sama antar desa
 - i) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
 - j) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- 2) Rencana pembangunan tahunan desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- Penjabaran dari sebuah RPJM Desa ini adalah pemerintah desa dapat menyusun sebuah RKP Desa. sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota maka pemerintah desa wajib menyusun yang namanya RKP Desa. dalam RKP Desa ini memuat tentang pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ini adalah dasar penetapan APB Desa.
- Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a) Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah desa
 - b) Pembentukan tim penyusun RKP desa
 - c) Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa
 - d) Pencermatan ulang dokumen RPJM desa

- e) Penyusunan rancangan RKP desa
- f) Penyusunan RKP desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
- g) Penetapan RKP Desa
- h) Perubahan RKP desa
- i) Pengajuan daftar usulan RKP desa.

Tahapan-tahapan di atas adalah gambaran mengenai perjalanan penyusunan RKP Desa. RKP Desa merupakan ini merupakan tahapan penting yang harus dilakukan agar nantinya dapat diterbitkan APB Desa. Pada dokumen RKP Desa ini membicarakan mengenai rencana dana desa yang bersumber dari APBN dan rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota.

e. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, kepala desa mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan Desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa. Menurut buku panduan perencanaan pembangunan desa ada dua pelaksanaan pembangunan desa diantaranya adalah pembangunan desa yang berskala lokal desa dan juga ada pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.

Pembangunan desa berskala lokal desa ini dilaksanakan sejak ditetapkannya APBDesa. pelaksanaan pembangunan desa ini dilakukan dengan melibatkan swakelola desa, maksudnya adalah pembangunan desa berskala lokal ini melibatkan pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan programnya yang dimaksudkan pihak ketiga ini adalah seorang pendamping desa. Pemerintah desa ini bekerja sama dengan pendamping desa dalam hal pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan program daerah seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Program ini didelegasikan langsung ke desa agar desa memiliki kewenangan untuk mengurus pelaksanaan program pendamping sendiri. Semua program-program ini disepakati dan di bahas pada saat adanya musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Pelaksanaan program sektoral dan program daerah ini dilaksanakan oleh perangkat desa beserta unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah dikoordinasikan oleh kepala desa.

Ada dua tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya:

- 1) Tahap Persiapan:
 - a) Penetapan pelaksanaan kegiatan
 - b) Penetapan rencana kerja (Renja)
 - c) Sosialisasi
 - d) Pembekalan pelaksanaan kegiatan
 - e) Penyiapan dokumen administrasi
 - f) Pengadaan tenaga kerja
 - g) Pengadaan barang dan material.
- 2) Tahap Pelaksanaan:
 - a) Rapat kerja pelaksana kegiatan
 - b) Pemeriksaan kegiatan
 - c) Perubahan kegiatan
 - d) Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masyarakat
 - e) Penyiapan laporan keuangan
 - f) Pelestarian dan pemanfaatan hasil kerja.

4. Aspek - Aspek Perbandingan Pembangunan Desa

Membangun sebuah desa dalam bidang apapun harunya memiliki orientasi, karena tanpa orientasi yang jelas pembangunan desa akan sulit mencapai tujuan. Sebagai misal orientasi pembangunan nasional selama lebih dari 30 tahun selalu menggunakan paradigma pertumbuhan. Paradigma pertumbuhan mengacu pada laju pertumbuhan ekonomi yang ditakar dengan *Gross National Product* (GNP), yakni mengacu pada rata-rata pendapatan per kapita penduduk. Orientasi yang demikian ternyata tidak sesuai dengan situasi riil, karena GNP tidak aspirasi dengan penduduk Indonesia yang heterogen (kesenjangan yang signifikan) dalam hal kemampuan ekonomi serta jumlah penduduk yang sangat besar, (Prianto, 2012:31).

Penggunaan aspek pembangunan bisa berbeda untuk setiap desa khususnya desa yang mayoritas penduduk asli dengan mayoritas penduduk pendatang, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan dan harga makanan pokok yang rendah. Berdasarkan hal tersebut maka Syamsiah (2019:121), menjelaskan bahwa pembangunan desa dapat diukur dengan lima aspek antara lain:

a. Pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makro ekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makro ekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan dinegara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis

ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

b. Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja, di lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

c. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di Negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan desa.

d. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau *Physical Quality of life Index* (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini

dibuat indikator makro ekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Aspek ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, di samping pendapatan per kapita bagai ukuran kuantitas manusia.

e. Indeks pembangunan manusia (*human development index*)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan - pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap

paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan *Purchasing Power Parity*. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkul dalam peningkatan *knowledge*, *attitude* dan *skills*, di samping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

4.2 Tinjauan tentang Potensi Desa

1. Pengertian Potensi Desa

Menurut Soleh (2017:32), potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah akan memengaruhi perkembangan wilayah tersebut berdasarkan potensi wilayah, pedesaan digolongkan menjadi tiga.

- a. Wilayah desa berpotensi tinggi, terdapat di daerah dengan lahan pertanian subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis. Kemampuan wilayah untuk berkembang lebih besar
- b. Wilayah desa berpotensi sedang, terdapat di daerah dengan lahan pertanian agak subur, topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semi teknis. Wilayah ini masih cukup mempunyai kemampuan untuk berkembang
- c. Wilayah desa berpotensi rendah, terdapat di daerah lahan pertanian tidak subur, topografi kasar (perbukitan), sumber air bergantung pada curah hujan. Wilayah ini sulit untuk berkembang.

Menurut Bawono dan Setyadi (2019:18-21), menjelaskan bahwa secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Potensi fisik

Potensi fisik desa adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada pada desa itu sendiri. Sumber daya yang masuk dalam potensi fisik yaitu:

- 1) Lahan, lahan bukan hanya untuk wadah tumbuh tanaman, tetapi digunakan sebagai asal bahan tambang dan mineral. Lahan mempunyai tipe tanah yang digunakan untuk media bagi tumbuhnya tanaman tertentu. Misalnya, tipe tanah aluvial yang pas untuk tanaman padi, jagung, dan kacang. Tipe tanah berkapur yang pas bagi tanaman jati dan tebu, pada lahan juga dimungkinkan terjadinya pemanfaatan bahan tambang seperti, batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, batu marmer, dan lain sebagainya.
- 2) Tanah, adalah bagian terpenting bagi kehidupan warga desa. Meliputi berbagai kekayaan alam yang terdapat didalamnya. Misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral
- 3) Air, digunakan oleh tiap-tiap makhluk hidup untuk memperkuat hidup dan untuk menyelesaikan kegiatan sehari-hari. Umumnya desa mempunyai potensi air yang bersih dan melimpah ruah. Air di dalam tanah diperoleh dari penimbaan, pemompaan, atau mata air, yang berguna untuk kebutuhan kehidupan manusia
- 4) Manusia, dalam perspektif ini diartikan sebagai tenaga kerja, yang merupakan sumber tenaga dalam proses pengelolaan lahan pertanian, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, keterampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.
- 5) Cuaca serta iklim, mempunyai kedudukan yang penting untuk warga negara. Iklim sangat erat hubungannya dengan suhu dan curah hujan yang mempengaruhi di setiap daerah. Pada ketinggian tertentu, suatu desa menjadi maju karena kecocokan iklimnya untuk peningkatan tanaman dan pemanfaatan tertentu. Seperti perkebunan buah-buahan, tempat berwisata, dan tempat

peristirahatan atau *rest* area. Sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat

- 6) Ternak, mempunyai kegunaan untuk sumber tenaga hewan, dan sumber gizi untuk masyarakat pedesaan. Pada desa agraris ternak dapat menjadi permodalan dan sumber pupuk.

b. Potensi non fisik

Potensi non fisik yang ada di desa adalah segala potensi sumber daya sosial dan tata perilaku masyarakat yang ada di desa yang tersebut. Potensi non fisik lainnya yaitu lembaga desa, aparatur desa, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat yang hidup dalam waktu yang lama akan melahirkan tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan bakal rentan oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri. sumber daya yang termasuk potensi non fisik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masyarakat desa yang hidup dengan bergotong-royong membuat tekad produksi, dan pembangunan desa. Merupakan pondasi yang solid untuk kelangsungan rencana pembangunan serta merupakan kekuatan dalam membangun pedesaan
- 2) Aparatur desa atau pamong desa yang berusaha secara maksimal untuk menjadi sumber ketertiban, serta kemahiran aparatur atau pamong desa. Aparatur yang jujur, disiplin, dan kreatif merupakan motor penggerak pembangunan di desa. Contohnya kepala desa, kepala dusun, kepala adat, dan lain-lain.

2. Pengembangan Potensi Desa

Pengembangan potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (Sholeh,2017:36).

Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Hal ini lebih ditegaskan dalam pengaturan mengenai desa yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Nuryasin, 2020:22).

3. Tujuan Pengembangan Potensi Desa

Tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah:

- a. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab
- b. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin
- c. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha
- d. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan
- e. Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun *stakeholders* lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program
- f. Rendahnya produktivitas masyarakat di pedesaan

- g. Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat pertumbuhan wilayah belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (Sholeh, 2017:36).

2.3 Tinjauan tentang Desa Transmigrasi dan Desa Non Transmigrasi

1. Desa Transmigrasi

Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari Jawa yang padat penduduknya ke luar Jawa yang kurang padat penduduknya, dan mempunyai berbagai tujuan, diantaranya: mengurangi penduduk di Jawa, menambah pembangunan daerah-daerah yang kekurangan penduduk, pertimbangan-pertimbangan strategis, usaha mempercepat proses asimilasi dan sebagainya. (Hardjosudarmo, 2015:26)

Transmigrasi ialah perpindahan, dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang. (Heeren, 2019:6). Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk yang disponsori oleh pemerintah. Kebijakan transmigrasi ditempuh pemerintah karena penyebaran penduduk di kawasan Negara ini dianggap berat sebelah, ada daerah yang terlalu padat penduduknya dan ada yang terlalu jarang, sehingga kehidupan penduduk dan perkembangan daerah beserta masyarakatnya tidak seperti yang diharapkan. Tujuan transmigrasi tidak hanya memindahkan petani dari pulau Jawa yang terlalu padat, melainkan untuk menuju pembangunan perekonomian. Tidak hanya untuk kepentingan petani-petani dari pulau Jawa yang kekurangan tanah, juga untuk pembangunan daerah-daerah yang ditangani transmigrasi. (Prawiro, 2019:116).

Transmigrasi ada dua bentuk yang pertama adalah transmigrasi umum dan yang kedua transmigrasi swakarsa. Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang dilaksanakan dengan biaya pemerintah sepenuhnya. Sedangkan transmigrasi swakarsa ditanggung oleh transmigran yang

bersangkutan, atau oleh pihak lain, perorangan atau yayasan yang bergerak dalam bidang perpindahan pemukiman penduduk. Tetapi, tanah tetap menjadi tanggungan pemerintah. Apabila ada orang perorangan atau yayasan yang melaksanakan pemindahan tanpa bantuan pemerintah sama sekali, dan melalui prosedur perpindahan biasa, maka proses ini tidak termasuk kategori transmigrasi. (Prawiro, 1979:119)

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa desa transmigrasi adalah desa yang mayoritas penduduknya berasal dari masyarakat pendatang yang melakukan perpindahan dari satu wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang lebih jarang penduduknya, sehingga tujuan untuk penyebaran penduduk yang lebih seimbang dan untuk pembangunan ekonomi di daerah transmigrasi.

2. Desa Non Transmigrasi

Desa non transmigrasi adalah kesatuan masyarakat yang tidak melakukan perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lain yang diakui secara hukum dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten, (Bintarto, 2016:11).

2.4 Kerangka Pikir

Pembangunan desa pada umumnya telah berlangsung berdampingan dengan perubahan ekologis, sosial-budaya manusianya serta aspirasi material dan spiritualnya. Pembangunan desa di harapkan bersumber pada manusia sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Perkembangan harus berupa metamorfosis sosial-ekonomi dan budaya yang wajar, yang meningkatkan kualitas hidup. Sehingga pembangunan desa haruslah kembali kepada masyarakat desa sendiri yang lebih sejahtera. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Namun pembangunan desa saat ini belum merata sehingga memiliki kesejahteraan yang tidak merata antara desa satu dengan desa yang lainnya, hal itu tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan potensi desa baik fisik maupun non fisik, hal itu sering terjadi pada desa transmigrasi dan desa non transmigrasi, di mana fakta di lapangan menunjukkan bahwa desa transmigrasi memiliki potensi ekonomi desa yang lebih maju dan berkembang di bandingkan dengan desa non transmigrasi hal itu bisa dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat di mana masyarakat di desa transmigrasi lebih maju mulai dari infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam baik hasil panen padi, palawija dan pemanfaatan perkebunan lainnya, selain itu masyarakat di desa transmigrasi lebih mampu mengembangkan potensi desa seperti peternakan dan perikanan serta industri kreatif. Berbanding terbalik dengan desa non transmigrasi yang di tempati masyarakat asli desa di mana masyarakat hanya sebagai penggarap dan enggan untuk mengembangkan potensi desa yang melimpah.

Pada hal pemanfaatan potensi ekonomi desa apabila mampu dilaksanakan dengan maksimal akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat desa bisa terbebas dari kemiskinan. Oleh karena itu masih adanya kesenjangan antara desa transmigrasi dengan desa non transmigrasi dari segi pembangunan potensi ekonomi desa menurut Syamsiah (2019:121), bisa di ukur dengan beberapa indikator antara lain:

1. Pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di desa. Indikator pendapatan per kapita akan dilihat dari sisi distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi

2. Struktur ekonomi

Struktur ekonomi yang akan dilihat dari pembangunan potensi desa melalui peningkatan tenaga kerja pada industri kreatif di desa maupun usaha pertanian, perikanan dan peternakan yang berkembang di desa serta untuk melihat kontribusi hasil pemanfaatan potensi ekonomi desa untuk perkembangan desa.

3. Urbanisasi

Urbanisasi bagian dari pembangunan desa oleh karena itu dalam urbanisasi ini akan dilihat dari aspek seberapa banyak masyarakat yang memilih tinggal atau pindah ke perkotaan di bandingkan tinggal di desa untuk mencari pekerjaan atau menambah penghasilan.

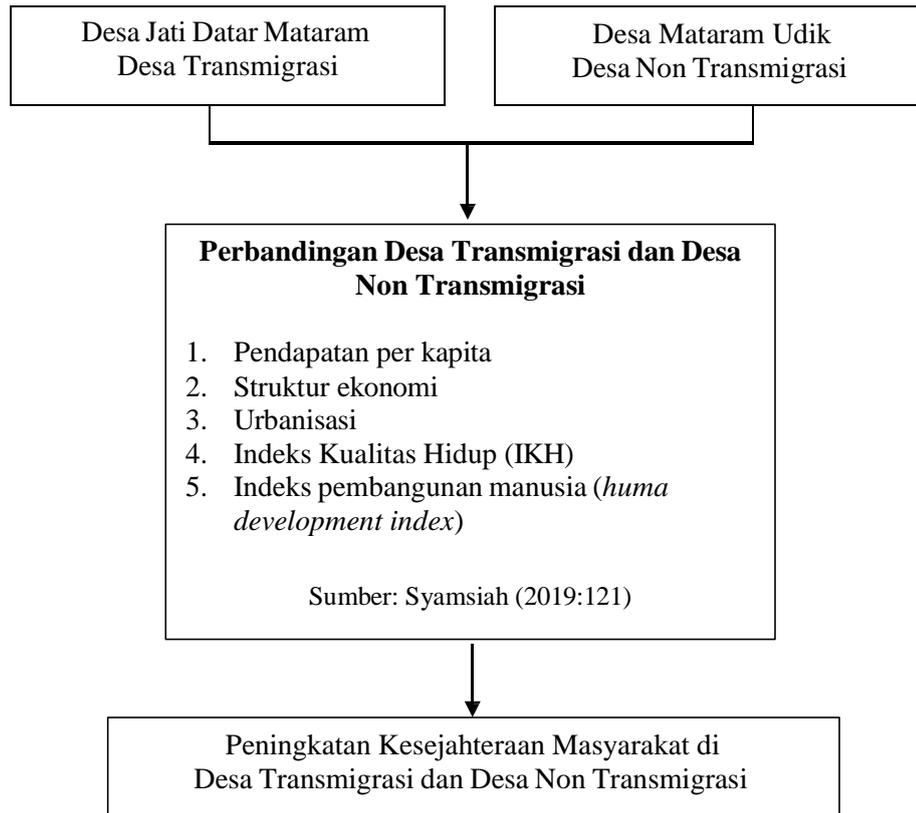
4. Indeks Kualitas Hidup(IKH)

Indeks kualitas hidup bagian dari cara mengukur pembangunan potensi desa karena indikator ini akan memberikan gambaran terkait dengan kesejahteraan masyarakat atau keberhasilan masyarakat dalam memanfaatkan potensi desa, oleh karena itu aspek ini akan melihat berbagai aspek mulai dari kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, layanan pendidikan dan akses terhadap kemudahan mendapatkan layanan ekonomi seperti layanan simpan pinjam, layanan mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan di desa dan layanan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan sumber daya manusia.

5. Indeks pembangunan manusia (*human development index*)

Pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia, pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkul dalam peningkatan *knowledge*, *attitude* dan *skills*, di samping derajat pemerataan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat peneliti gambarkan dalam bentuk kerangka pikir di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir
Sumber: Diolah Oleh Peneliti, Tahun 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, (Moleong, 2011:28). Lebih lanjut Moleong (2011:29), mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti obyek dengan cara menuturkan, menafsirkan data yang ada, adapun pelaksanaannya melalui pengumpulan, penyusunan, analisa dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang. Tipe penelitian ini dianggap sangat relevan untuk dipakai karena menggambarkan keadaan obyek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadang kala perlu pula melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadang kala perlu pula

melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut, (Moleong, 2011:37).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian, hal ini karena suatu penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah, (Moleong, 2011:41). Prinsipnya fokus penelitian dimaksudkan untuk dapat membantu penulis agar dapat melakukan penelitiannya sehingga hanya akan ada beberapa hal atau beberapa aspek yang dapat diarahkan penulis sesuai dengan tema yang telah di tentukan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka fokus pada dalam penelitian ini adalah perbandingan potensi ekonomi desa transmigrasi dan desa non transmigrasi pada Desa Jati Datar Mataram dan Desa Mataram Udik, dengan sub indikator adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan per kapita
2. Struktur ekonomi
3. Urbanisasi
4. Indeks Kualitas Hidup(IKH)
5. Indeks pembangunan manusia (*huma development index*).

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini mengambil lokasi di Desa Jati Datar Mataram dan Desa Mataram Udik, dengan alasan sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian lebih dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga lebih efektif dan efisien baik dari waktu maupun biaya operasional penelitian

2. Adanya perbedaan dan persamaan yang signifikan antara Desa Mataram Udik sebagai desa non transmigrasi dan Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi.

3.4 Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2011:112). Sumber data yang digunakan adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari. Cara pengambilan data primer melalui wawancara, wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumber data. Wawancara yang penulis lakukan dengan teknik wawancara berstruktur, wawancara berstruktur dengan cara menggunakan panduan wawancara sehingga informasi yang diperoleh tidak menyimpang dan mampu menjawab permasalahan peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dipergunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari buku-buku, penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Berbagai dokumen dihasilkan melalui objek penelitian yang merupakan data sekunder guna mendukung dan memperkuat data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen tentang pengembangan usaha ekonomi kreatif desa, potensi sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja di UMKM yang ada di Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi dengan Desa Mataram Udik sebagai desa transmigrasi, data kemiskinan Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi dengan

Desa Mataram Udik sebagai desa non transmigrasi, data hasil produksi Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi dengan Desa Mataram Udik sebagai desa non transmigrasi dan data-data lain yang relevan dengan hasil penelitian ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti harus memasang strategi dalam persiapan mengumpulkan data-data lapangan yang diteliti, pemilihan tempat yang tepat sasaran adalah strategi yang tepat untuk menjaring banyak informan dan informasi. Keakraban juga sangat diutamakan untuk menciptakan suasana yang tidak terlalu formal kemudian menggunakan kaidah-kaidah penelitian yang benar dan tanpa mengundang rasa ke tidak nyamanan bagi informan. Menurut Moleong (2011:152), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, di mana peneliti perlu melakukan pengamatan secara langsung ke tempat objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang akan di lakukan. Dalam teknik observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dan mencatat secara sistematis gejala ataupun fenomena yang ditemui dan diselidiki, baik itu berupa sikap, perilaku, maupun kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa dan masyarakat desa di Desa Mataram Udik sebagai desa non transmigrasi dan Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi dalam mengembangkan potensi ekonomi desa. Dengan pengamatan langsung ini, peneliti memperoleh keterangan-keterangan ataupun informasi yang sangat mendukung permasalahan penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti, melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai obyek yang diamati, karena peneliti dalam hal ini akan mengadakan pengamatan langsung.

2. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, dengan maksud tertentu, dengan cara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2011:96). Metode ini digunakan untuk mengetahui perbandingan potensi ekonomi desa transmigrasi dan desa non transmigrasi pada Desa Jati Datar Mataram dan Desa Mataram Udik. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan, menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada informan. Berikut ini adalah informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Nama	Jabatan	Tempat
Siti Aisah	Kepala Desa Jati Datar Mataram	Kantor Desa Jati Datar Mataram
Rudiyanto	Kepala Desa Mataram Udik	Kantor Desa Mataram Udik
Andriyansah	Masyarakat Desa Jati Datar Mataram	Rumah warga Desa Jati Datar Mataram
Ardi Yanto	Masyarakat Desa Mataram Udik	Rumah warga Desa Mataram Udik

3. Dokumentasi

Dokumentasi pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peneliti (Usman dan Akbar, 2014:69). Data dokumentasi dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian, maupun jurnal, artikel dan laporan-laporan penelitian yang sudah ada sehingga menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini.

3.6 Tahnik Pengelolaan Data

Tahap pengolahan data merupakan tahap yang paling penting. Setelah peneliti melakukan semua serangkaian penelitian, data yang diperoleh dari berbagai responden yang telah diteliti kemudian diolah dan dianalisis. Maka diperlukan tahap ini untuk mengemas sebuah penelitian dalam sebuah laporan yang mudah dimengerti oleh pembaca. Hal-hal yang berkaitan dengan tahap pengolahan dan analisis data akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

1. Editing Data

Pada proses editing, peneliti melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kembali dengan data yang telah diperoleh di Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi dengan Desa Mataram Udik sebagai desa non transmigrasi selama melaksanakan penelitian. Pelaksanaan editing dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari hasil wawancara seperti tahap wawancara terhadap informan dan dokumentasi sesuai dengan keperluan penelitian.

2. Interpretasi Data

Interpretasi adalah memberikan penjabaran atau tentang penjelasan mengenai berbagai data yang sudah diperoleh sesuai dengan judul penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan cara menguraikan jawaban dari narasumber dalam bentuk mendeskripsikan sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data. Analisis data kualitatif menurut Moleong (2011:119), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dituangkan ke dalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya disusun secara sistematis. Kegiatan yang dilakukan pada tahap reduksi data adalah memilih dan merangkum data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

2. Penyajian data (*display data*)

Untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian harus diusahakan membuat bermacam matriks, grafik, jaringan, dan bagian atau bisa pula dalam bentuk naratif saja. Kegiatan dilakukan pada tahap *display* data adalah menyajikan data secara naratif, yaitu menceritakan hasil wawancara ke dalam bentuk kalimat dan disajikan pada pembahasan

3. Mengambil kesimpulan atau verifikasi data

Peneliti berusaha mencari arti, pola, tema, yang penjelasan alur sebab akibat, dan sebagainya. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama penelitian berlangsung, dalam hal ini dengan cara penambahan data baru. Kegiatan yang penulis lakukan pada tahap verifikasi data adalah membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, (Moleong, 2011:251).

3.8 Keabsahan Data

Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data yang tepat, salah satu caranya yaitu dengan proses triangulasi, Menurut Moleong (2011:102), triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Pemeriksaan keabsahan peneliti menggunakan triangulasi data triangulasi data menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip hasil wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai beberapa subjek yang

dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Sedangkan triangulasi metode peneliti menggunakan beberapa metode untuk meneliti suatu hal. Pada kajian ini peneliti menggunakan metode penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Desa Mataram Udik Sebagai Desa Non Transmigrasi

4.1.1 Sejarah Desa Mataram Udik

Desa Mataram Udik adalah desa yang terletak di tengah-tengah kecamatan Bandar Mataram. Masyarakat Desa Mataram Udik merupakan penduduk asli bukan transmigrasi. Desa Mataram Udik sebagian penduduk asli memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh. Selain itu Desa Mataram Udik untuk peradaban pendidikan dan kegiatan masyarakat aktif dalam upaya memajukan peradaban masyarakat.

Masyarakat antara petani, guru, buruh, aparat desa saling melakukan kerja sama dalam upaya menjalin dan memajukan peradaban serta saling mengisi dan melengkapi. Kerja sama penduduk dapat berjalan dengan baik untuk bersama-sama membangun desa yang dilandasi dengan semangat gotong royong sehingga desa Mataram Udik menampakkan kemajuan yang ditandai dengan dibangunnya prasarana balai desa, Sekolah, Masjid, Musholi, pos ronda, *medical* (puskesmas). Kehidupan dan kesejahteraan penduduknya semakin meningkat terlihat dari pembangunan dan perkembangan prasarana perumahan warga yang cukup memadai. Dengan tingkat pendidikan yang relatif maka sebagian besar penduduk desa Mataram Udik bekerja sebagai petani dan buruh.

4.1.2 Keadaan Geografis Desa Mataram Udik

Desa Mataram Udik salah satu dari 9 kampung diwilayah kecamatan Bandar Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik mempunyai luas 70.828 ha. Desa Mataram Udik jauh dari kota. Desa Mataram Udik sebagaimana desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan sehingga berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Mataram Udik.

Sedangkan letak geografi Kampung Mataram Udik , terletak di antara:

Sebelah Utara : Tulang Bawang
 Sebelah selatan : Kampung Jati Datar
 Sebelah Barat : Kampung Terbangi Ilir
 Sebelah Timur : Kampung Mataram Jaya

4.1.3 Kondisi Penduduk Desa Mataram Udik

Penduduk desa Mataram Udik berdasarkan data yang diperoleh pada bulan tahun 2022, mempunyai jumlah penduduk 34.308 jiwa yang tersebar di 9 (Sembilan) dusun, dengan rincian 3,822 laki-laki dan 3,641 berjenis kelamin perempuan, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Gambar 4.1 Kondisi Penduduk Desa Mataram Udik

Sumber: <https://mataramudik-desas.id/first/statistik/4>

4.1.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Mataram Udik

Mata pencaharian Desa Mataram Udik sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh, selain itu juga ada yang bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri. Berikut ini adalah grafik mata pencaharian penduduk:



Gambar 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Mataram Udik

Sumber: <https://mataramudik-desa.id/first/statistik/4>

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa mata pencaharian penduduk di Desa Mataram Udik didominasi oleh petani di mana ada sebanyak 2.841 orang, pedagang atau wiraswasta sebanyak 809 orang, karyawan swasta sebanyak 43 orang, buruh sebanyak 25 orang, guru ada sebanyak 18 orang dan penduduk yang belum bekerja mencapai 1.434 orang.

4.1.5 Kondisi Pendidikan Penduduk di Desa Mataram Udik

Bidang pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan utama bagi desa Mataram Udik. Baik itu pendidikan formal maupun non formal serta lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Sebagian masyarakat desa Mataram Udik menyadari bahwa pendidikan sangatlah penting. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kesadaran yang tinggi oleh orang tua untuk

menyekolahkan anak-anaknya meskipun ada di antara mereka hidup dengan pendapatan yang sedang. Dengan kondisi seperti itu tidak mengurangi semangat orang tua yang mengutamakan faktor pendidikan buat anak-anaknya. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Gambar 4.3 Kondisi Pendidikan Penduduk di Desa Mataram Udik

Sumber: <https://mataramudik-desa.id/first/statistik/4>

Berdasar grafik di atas dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Mataram Udik sebagian besar tidak tamat Sekolah Dasar/Sederajat ada sebanyak 2,693 masyarakat yang tidak tamam sekolah, 1,843 penduduk di Desa Mataram Udik tamam SLPT/Sederajat dan 1.067 tamam SMA/SLTA/Sederajat serta ada 972 penduduk di Desa Mataram Udik belum/tidak sekolah.

4.2 Gambaran Umum Desa Jati Datar Mataram Sebagai Desa Transmigrasi

4.2.1 Sejarah Desa Jati Datar Mataram

Kampung Jati Datar Mataram merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Penduduk Kampung Jati Datar Mataram adalah warga transmigrasi swakarsa yang berasal dari Yogyakarta dan Solo Jawa Tengah

pada tahun 1964 yang terbagi menjadi 3 rombongan dan tersebar di 3 wilayah. Sebanyak 100 Kepala Keluarga ditempatkan di Rombongan IX (merupakan pindahan dari Yogyakarta/Wonosari yang diketuai oleh Pujo Siswoyo), kemudian 100 Kepala Keluarga di Rombongan VII (merupakan pindahan dari Solo yang diketahui oleh Kadariman), sisanya 100 Kepala Keluarga di Rombongan X adalah pindahan dari Yogyakarta/Wonosari yang diketuai oleh Adi Sumitro.

Pada tahun 1966-1967 bergabunglah ketiga rombongan tersebut menjadi Rukun Keluarga yang dipimpin oleh Udi Sumarto yang membawahi 300 Kepala Keluarga. Dari tahun 1967-1968, sistem pemerintahan Kampung Jati Datar Mataram berubah dari Rukun Keluarga menjadi kampung definitif, dipimpin oleh seorang Kepala Kampung (yang ditunjuk oleh Jawatan Transmigrasi), yaitu Hamzah dan kampung ini terbagi menjadi 6 dusun/bayan. Pada saat ini, penduduk di Kampung Jati Datar Mataram terdiri dari berbagai suku dan agama. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar merupakan petani padi sawah, jagung, dan singkong, sedangkan sisanya adalah sebagai buruh, pedagang, dan pegawai.

4.2.2 Keadaan Geografis Desa Jati Datar Mataram

Kampung Jati Datar Mataram merupakan salah satu kampung yang berada di wilayah Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Jarak tempuh dari kampung ini ke Ibu kota Kabupaten sekitar 42 KM atau 1.5 jam/perjalanan. Wilayah Kampung Jati Datar Mataram banyak digunakan untuk lahan pertanian, seperti padi sawah, jagung, dan singkong.

Batas wilayah Kampung Jati Datar Mataram adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mataram Udik/Mataram Jaya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Banjar Agung
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Terbangi Mulya/Terbangi Ilir
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sendang Agung.

4.2.3 Kondisi Penduduk Desa Jati Datar Mataram

Penduduk merupakan sekumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu sebagai sumber daya penggerak pembangunan. Berikut ini data jumlah penduduk di Desa Jati Datar Mataram berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Desa Jati Datar Mataram Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki - Laki	2.766	49,92
2	Perempuan	2.774	50,08
	Jumlah	5.540	100.00

Sumber: Monografi Kampung Jati Datar Mataram 2023

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Jati Datar Mataram tahun 2022 adalah sebanyak 5.540 jiwa, terdiri dari 2.766 j penduduk laki-laki dan 2.774 jiwa penduduk perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.583 KK. Jika dilihat dari banyaknya jumlah KK yaitu 1.583 jiwa, maka dapat diprediksi bahwa jumlah anggota keluarga dalam setiap KK sebanyak 3,4 jiwa

4.2.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Jati Datar Mataram

Pada kehidupan masyarakat, mata pencaharian merupakan aktivitas utama manusia untuk memperoleh taraf hidup dengan cara memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada pada lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang terwujud sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut ini adalah mata pencaharian penduduk Desa Jati Datar Mataram.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk di Desa Jati Datar Mataram Berdasarkan Mata Pencaharian, Tahun 2022

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	2.672	48,23
2	Pedagang	135	2,44
3	PNS	36	0,65
4	Tukang	76	1,37
5	Guru	35	0,63
6	Bidang/Perawat	6	0,11
7	TNI/Polri	3	0,05
8	Sopir	40	0,72
9	Buruh	318	5,74
10	Pensiunan	4	0,07
11	Belum Bekerja	2.215	39,98
	Jumlah	5.540	100,00

Sumber: Monografi Kampung Jati Datar Mataram 2023

Mata pencaharian yang paling banyak ditekuni sebagai penggerak perekonomian masyarakat adalah bidang pertanian. Banyaknya masyarakat yang bertani karena beberapa faktor, yakni tersedianya lahan yang cukup luas di Kampung Jati Datar Mataram yaitu (162,5 ha) sehingga masyarakat cenderung memilih bekerja sebagai petani, selain itu kegiatan pertanian juga dianggap sebagai pekerjaan yang dapat dilakukan oleh semua golongan masyarakat tanpa membutuhkan latar pendidikan yang tinggi.

4.2.5 Kondisi Pendidikan Penduduk di Desa Jati Datar Mataram

Pendidikan merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari lembaga formal, informal, dan non formal. Berikut ini adalah data penduduk Desa Jati Datar Mataram berdasarkan tingkat pendidikannya.

Tabel 4.3. Distribusi Penduduk Desa Jati Datar Mataram Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	SD/MI	425	7,67
2	SLTP/MTs	395	7,13
3	SLTA/MA	420	7,58
4	S1/Diploma	50	0,90
5	Putus Sekolah	-	-
6	Tidak Sekolah	4.250	76,71
	Jumlah	5.540	100,00

Sumber: Monografi Kampung Jati Datar Mataram 2023

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa SD/MI (sebanyak 425 orang atau 7,67%), kemudian SLTA/MA (420 orang atau 7,58%), SLTP/MTs (395 orang atau 7,13%), (S1/Diploma 50 orang atau 0,90% dari jumlah penduduk), Tidak Sekolah (sebanyak 4.430 orang atau 76,71%). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Jati Datar Mataram tergolong masih rendah, karena sebagian besar penduduknya tidak menempuh pendidikan.

VI. PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan potensi ekonomi Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi lebih baik di bandingkan dengan Desa Mataram Udik hal itu terlihat dari: *Pertama*, pendapatan per kapita Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi tinggi didapatkan yaitu sebesar Rp. 5.023.000 dan rata-rata pendapatan tertinggi Rp. 1.916.804. Desa Mataram Udik sebagai desa non transmigrasi memiliki tingkat pendapatan Rp. 5.723.000 dan pendapatan rata-rata sebesar Rp. 1.846.108. *Kedua*, struktur ekonomi Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi banyak potensi ekonomi yang di manfaatkan mulai dari potensi di sektor pertanian, potensi peternakan, potensi perkebunan, serta potensi di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang di kelola oleh BUMDes. Sementara itu Desa Mataram Udik hanya mengandalkan potensi di sektor pertanian dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ketiga, urbanisasi Desa Mataram Udik sebagai desa non transmigrasi dan Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi tidak terlalu tinggi karena masing-masing desa sudah menyiapkan lapangan pekerjaan, seperti Desa Mataram Udik yang aktif dalam pengembangan UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 1.110, sementara itu Desa Jati Datar Mataram mampu mengembangkan potensi-potensi desa mulai dari pertanian, perikanan, hortikultura, UMKM dan potensi-potensi lainnya sampai mampu menyerap tenaga hingga 1.410 tenaga kerja. *Keempat* Harapan Lama Sekolah (HLS) Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi sedikit lebih baik di bandingkan dengan Desa Mataram Udik

sebagai desa non transmigrasi terlihat dari rata-rata lama sekolah penduduk Desa Jati Datar Mataram sebesar 7,79 dan pada tahun 2022 telah naik hingga mencapai 8,08 sedangkan Desa Mataram Udik sebesar 7,38 dan pada tahun 2022 telah naik hingga mencapai 7,59. Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) telah mencapai 70,77 dibandingkan dengan Desa Jati Datar Mataram yang juga mencapai 69,87 tahun. Pengeluaran per kapita Desa Jati Datar Mataram lebih tinggi dibandingkan dengan Desa Mataram Udik. Di mana tahun 2022 pengeluaran per kapita penduduk Desa Jati Datar Mataram mencapai Rp 11,259 juta per kapita per tahun.

Kelima, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Desa Jati Datar Mataram sedikit lebih tinggi di bandingkan dengan Desa Mataram Udik hal itu terlihat dari tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Desa Jati Datar Mataram sebesar 68,98 dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022 mencapai 70,22. Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Desa Mataram Udik cenderung lebih rendah dan tidak stabil di mana pada tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Desa Mataram Udik sebesar 67,81 meningkat pada tahun 2020 sebesar 69,74 dan menurun pada tahun 2021 menjadi 69,34 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 69,97.

Keberhasilan dalam pengembangan potensi ekonomi baik di Desa Mataram Udik sebagai desa non transmigrasi maupun Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi, tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung. Faktor pendukung pengembangan potensi ekonomi Desa Mataram Udik sebagai desa non transmigrasi adalah faktor internal yaitu niat dan semangat individu dalam melakukan pengembangan potensi ekonomi melalui berbagai inovasi dan kerajinan UMKM, faktor eksternal yaitu dukungan dari pemerintah daerah dan dukungan dari masyarakat. Faktor pendukung pengembangan potensi ekonomi Desa Jati Datar Mataram antara lain tersedianya potensi sumber daya alam, kemauan yang kuat dari masyarakat, pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Walaupun kedua desa baik Desa Mataram Udik sebagai desa non transmigrasi Desa Jati Datar Mataram sebagai desa transmigrasi memiliki berbagai pendukung

untuk mengembangkan potensi ekonomi desa namun tetap ada faktor yang menjadi penghambat. Faktor penghambat pada Desa Mataram Udik antara lain kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang, kondisi jalan yang kurang baik, keterbatasan ruang gerak masyarakat, adanya bencana yang tidak terduga dan terbatasnya dukungan dari pihak swasta. Sedangkan faktor penghambat pada Desa Jati Datar Mataram antara lain keterbatasan biaya dan kurangnya sarana dan prasarana.

6.2 Saran

Setelah adanya kesimpulan dari penelitian ini, selanjutnya penulis menyumbangkan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan proses pengembangan lebih lanjut, karena dari hasil penelitian masih di temukan ada yang kurang berjalan, oleh karena itu Kepada desa baik Desa Mataram Udik maupun Desa Jati Datar Mataram hendaknya lebih maksimal dan bekerja keras lagi untuk mendorong masyarakat dalam pengembangan potensi desa, misalnya terjun langsung melihat bagaimana keadaan dari masyarakat dan memberikan pengarahan supaya terlibat aktif dalam pengembangan potensi desa, karena masyarakat harus dipahami dengan cara yang berbeda, ketika hanya sosialisasi semata yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan potensi desa hasilnya masyarakat akan merasa bosan dan tidak peduli dengan program dan tujuan pemerintah desa.

Pemerintah desa hendaknya juga perlu menjalin komunikasi atau kerja sama dengan pengurus desa dari daerah lain untuk bisa bekerja sama dalam pengembangan potensi desa, supaya bisa lebih baik lagi mendorong atau melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan potensi desa. Selain itu pemerintah desa baik Desa Mataram Udik maupun Desa Jati Datar Mataram harus mampu menyeimbangkan program kerja dalam pengembangan potensi Desa, di mana banyak potensi desa belum mampu dikembangkan dengan maksimal misalnya saja potensi desa dibidang pertanian dan bidang wisata masih belum terlihat pengembangannya, di kembangkan melalui sebuah perlombaan produksi usaha terbaik dan modal di biayai oleh pemerintah desa, melakukan

pertunjukan hasil pertanian terbaik, supaya masyarakat lebih bersemangat dan lebih mendongkrak pola pikir masyarakat, menyebar brosur untuk mengenalkan destinasi wisata supaya masyarakat terlibat aktif dalam pengembangan potensi desa sehingga bisa mempercepat mewujudkan sebagai desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2016. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bardi, Syamsul. 2010. *Pengantar Geografi Desa*, Banda Aceh: Al-Washliyah University Press (AUP)
- Basah, Sjachran. 2014. *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Jakarta: Bina Aksara.
- Bawono, Icuk Rangga dan Erwin Setyadi. 2019. *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*. Jakarta: PT Gransindo
- Bintarto, R. 2016. *Desa-Kota*, Bandung: Alumni
- Dzafina, Calya. 2019. *Desa Maju Negara Maju*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia
- Hartono, Sunaryati. 2021. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum*, Bandung: Alumni
- Hardjosudarmo, Soedigdo. 2015. *Kebijaksanaan Transmigrasi Dalam Rangka Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Bhatara.
- Heeren, H.J. 2019. *Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Irawan, Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Isran, Bactiar. 2013. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, Uhaido Media Dan Offset
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Marhiyanto, Bambang. 2020. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Media Centre
- Mas'ood, Mohtar. 2018. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mintarjo, Sri., dan Sulistyowati, Eka Susi. 2019. *Perwilayahan Desa dan Kota*, Klaten: Suka Mitra Kompetensi

- Moleong, Lexy, J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Ramadja Karya.
- Prianto, Robert. 2012. *Pengembangan Desa Mulai Dari Belakang*. iJakarta: LP3ES.
- Prawiro, Ruslan H. 2019. *Kependudukan (Teori, Fakta & Masalah)*. Bandung: Penerbit Alumni
- Ramlan dan Sihombing, Eka N.A.M. 2021. *Hukum Pemerintah Desa*, Medan: Enam Media.
- Syamsiah, Badrudin. 2019. *Teori dan Indikator Pembangunan Desa*, Jakarta: Refika Aditama
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo S. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahjudin. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Jurnal:

- Alaslan, Amtai. Gaya Kepemimpinan dan Pembangunan Desa, *Jurnal AdBisPower – STIA Saumlaki*) Vol. 1 No 1. Maret 2020. hlm 102. https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=pengertian+desa+secara+umum&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabst&t=1650560203920&u=%23p%3DQ0EvO6JCMwQJ.
- Balinda Citra Pratiwi, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbangdes (Studi perbandingan di Desa Candimulyo Kecamatan Jombang, Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno, dan Desa Bendungan Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 5, 2020
- Hartmann., Christina dan Kwauk, Sport and development: An overview, critique, and reconstruction. *Journal of Sport and Social Issues* 35(3), 2021, 284 – 305.
- Norman, Perbandingan Pembangunan Desa Karya Jaya Dan Pembangunan Desa Tani Bakti Di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2017, 5 (3)
- Nuryasin, Ilham. Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Administrasi Bisnis*. 41 (1), 2020.

Roy Rickardo, Perbandingan Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa'Mering dan Desa Ma'Libu Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan), *eJournal Pemerintahan Integratif*, 2017, 5 (2)

Setyowati, Eka. 2019. Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa di Kabupaten Malang, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 9 No. 2, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/5324>.

Soleh, Ahmad, 2017. Strategi Pengembangan Potensi Desa, *Jurnal Sungkai*, Vol.05 No.1.